

## ABSTRAK

ISMI AYU FADILAH

NIM : 1910111056

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pencatatan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 membawa akibat hukum bagi peralihan hak. Akibat hukumnya adalah proses peralihan hak akan terhambat dan pemilik tanah atau sertipikat akan dirugikan karena tidak dapat melakukan peralihan hak dengan Akta Peralihan Hak. Pertimbangan atau alasan Kantor Pertanahan melaksanakan pemblokiran sertipikat tidak memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 adalah merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Kantor Pertanahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya dibidang pertanahan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tata pelaksanaan pencatatan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan yang tidak memenuhi syarat yang tercantum pada Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 memberi akibat hukum bagi peralihan hak. Akibat hukum yang terjadi adalah proses peralihan hak akan terhambat dan pemilik tanah atau sertipikat akan dirugikan karena tidak dapat melakukan peralihan hak dengan Akta Peralihan Hak.

**Kata Kunci:** Tanah, Hak, Peralihan

## ***ABSTRACK***

ISMI AYU FADILAH

NIM : 1910111056

This study explains that the implementation of recording in the land book at the Land Office that does not comply with the provisions of Article 126 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 has legal consequences for the transfer of rights. The legal consequence is that the process of transferring rights will be hampered and land owners or certificates will be harmed because they cannot transfer rights with the Deed of Transfer of Rights. The consideration or reason for the Land Office to block the certificate does not comply with the provisions of Article 126 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 is the implementation of the precautionary principle of the Land Office in order to realize good governance, especially in the field of land.

The conclusion of this study is that the procedure for recording in the land book at the Land Office does not meet the requirements listed in Article 126 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 has legal consequences for the transfer of rights. The legal consequence that occurs is that the process of transferring rights will be hampered and land owners or certificates will be disadvantaged because they cannot transfer rights with the Deed of Transfer of Rights.

**Keywords** : Land, Rights, Transition